

MaPOM

2

Majalah Pengawasan Obat dan Makanan

The 13th Session Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)

Keamanan Pangan, Tanggung Jawab Kita Bersama



VISI

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI

1. Memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM.
2. Memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
3. Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas pemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
4. Meningkatkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas pemerintahan.



Catatan REDAKSI

Selamat bersua lagi para pembaca setia Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (POM)!

Kami segenap redaksi MaPOM mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena majalah ini berhasil terbit untuk kedua kalinya untuk membagikan informasi terkait kegiatan-kegiatan Badan POM RI selama bulan April sampai dengan Juni 2019.

Pada edisi kedua ini, MaPOM mengambil tema **"Pangan Aman, Tanggung Jawab Kita Bersama"**. Tema ini bertepatan dengan datangnya bulan suci Ramadhan dimana hadirnya bulan Ramadhan diikuti dengan maraknya penjualan beragam pangan berbuka puasa, serta tingginya permintaan pangan olahan kemasan untuk bingkisan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk melindungi masyarakat terhadap pangan kedaluwarsa dan mengandung bahan berbahaya yang banyak beredar di bulan suci Ramadhan, Badan POM selalu melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang dan selama Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, setiap tanggal 7 Juni, dunia internasional memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia. Hal ini sejalan dengan salah satu tugas Badan POM yaitu mengawal keamanan pangan secara holistik, terkoordinasi, dan sistemik sepanjang hulu sampai hilir rantai pangan.

Badan POM selalu senantiasa berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk memperkuat tata kelola pengawasan pangan serta terus mengembangkan sistem pengawasan pangan yang efektif untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia.

Mari bersama kita wujudkan Indonesia maju, terdepan dengan tingkat keamanan pangan yang unggul.

REDAKSI :

Penanggungjawab:

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

Redaktur:

- Kepala Bagian Komunikasi dan Publikasi

Editor:

- Kepala Sub Bagian Publikasi
- Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Media
- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Opini Publik

Sekretariat:

- Dian Hermawati, S.Farm., Apt
- Fathan Nur Hamidi, S.Sos.I
- Bayu Kresna Septianto Anggoro, S.Farm., Apt
- Chandra Wino Adhanunggar, S.Ikom
- Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm., Apt
- Devi Oktaviani, S.Ikom
- Muhammad Rizky, SE
- Benny Robin, SE
- Yanuar Rahman, S.Ikom
- Moch. Rahardi Putranto
- Fadlan Khairul Anam, S. Sos
- Armacata. S.Tr., Ikom
- Faisal Nur Jabbar, A. Md
- Chyntia Dewi Nurhayati Suharma, S.T.P
- Grace Meity Ariani
- Tri Kuswantoro



 Jalan Percetakan Negara Nomor 23
Jakarta - 10560 - Indonesia
Selengkapanya

 +6221 4244691 / 42883309 / 42883462

 +6221 4263333

 +6281 21 9999 533 (SMS)

 ppid@pom.go.id; halobpom@pom.go.id
pengaduanyanblik@pom.go.id

 @bpom_ri

 @bpom.official

 bpom_ri

 Badan POM RI

DAFTAR ISI

Catatan Redaksi	03
Daftar Isi	04
Sahabat Badan POM Bertanya HaloBPOM Menjawab	05
LINTAS INFO	06
LAPORAN UTAMA	08
"Ramadhan Tiba" Badan POM Intensifkan Pengawasan Pangan	08
Tuan Rumah "The 13 th Session Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)"	10
Badan POM Bantu Republik Demokratik Timor Leste Perkuat Pengawasan Obat Dan Makanan	12
Hari Keamanan Pangan Sedunia "Keamanan Pangan, Tanggung Jawab Kita Bersama"	14
JELAJAH	16
Kampanye Cerdas Kosmetik Aman Bersama Kwarda Pramuka	16
Generasi Milenial, Pelopor Konsumen Cerdas Menggunakan Kosmetik Aman	18
PERKUATAN KELEMBAGAAN	20
Program Kebugaran Badan POM, Nyalakan Obor Integritas	20
PENEGAKAN HUKUM	22
Badan POM, <i>National Coordinator Operasi Opsan VIII-2019</i> : 61 Miliar Rupiah Pangan Ilegal Disita	22



PENINGKATAN DAYA SAING	24
Fitofarmaka Dan Produk Biologi, Dua Komoditi Potensial Yang Perlu Mendapat Perhatian Lebih	24
Lindungi Kesehatan Masyarakat Dengan Memastikan Obat JKN Aman Dan Berkualitas	26
Dorong Pengembangan Produk Jamu dan Suplemen Kesehatan	28
KOORDINASI LINTAS SEKTOR	30
KERJASAMA INTERNASIONAL	32
Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia - Papua Nugini Badan POM Kunjungi Perbatasan Vanimo	32
PRESTASI	34
Badan POM Pertajam Pengawasan Intern	34
GALERI BADAN POM	36
WACANA	40
Badan POM Teguhkan Komitmen Pancasila	40
JENDELA	42
INFOGRAFIS	43
MASKOT BPOM	48
(POMPI) POM Pemberi Informasi	48

Pertanyaan:

Kapan mulai berlaku kebijakan wajib sertifikasi halal untuk pangan yang beredar?

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk pangan yang beredar wajib sertifikasi halal berlaku mulai tanggal 17 Oktober 2019. Untuk produk pangan yang telah beredar namun belum mencantumkan logo halal perlu segera mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan mengajukan perubahan variasi ke Badan POM jika sertifikat halal telah dimiliki.

Pertanyaan:

Berapa lama masa berlaku *Certificate of Free Sale* (CFS) impor produk pangan?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, masa berlaku *Certificate of Free Sale* (CFS) impor produk pangan sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual, jika tidak tercantum maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

Pertanyaan:

Izin usaha apa yang dibutuhkan untuk pendaftaran produk pangan lokal?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.05.1.51.03.17.0862 Tahun 2017 tentang Deregulasi Pendaftaran Pangan Olahan, izin usaha yang dibutuhkan untuk pendaftaran pangan olahan lokal adalah izin usaha di bidang produksi pangan (Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)) atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat.

Pertanyaan:

Berapa biaya perubahan variasi produk pangan olahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu?

Jawaban:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, bahwa biaya perubahan variasi produk pangan olahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu adalah Rp. 100.000,- per item.



SAHABAT BADAN POM BERTANYA HaloBPOM MENJAWAB

-  081 191 81 533
-  081 21 9999 33
-  halobpom@pom.go.id
-  @BPOM_RI
-  bpom_ri



Pertanyaan:

Bagaimana tatacara penambahan 2D *Barcode* pada produk yang sudah mendapatkan Nomor Izin Edar Badan POM sebelum pemberlakuan Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D *Barcode* Dalam Pengawasan Obat Dan Makanan?

Jawaban:

1. Jika perusahaan ingin melakukan penyesuaian dengan Peraturan Badan POM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D *Barcode* Dalam Pengawasan Obat dan Makanan, maka perlu melalui proses pendaftaran perubahan variasi.
2. Label pangan olahan yang telah memiliki izin edar wajib menyesuaikan paling lama 30 bulan (19 April 2021) sejak peraturan diundangkan.

Pengawasan Obat dan Makanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Daerah



Kantor Badan POM di Kabupaten Tangerang bersama Balai Besar POM di Serang, Korwas Polda Banten, Dinas Kesehatan Kab. Tangerang dan Puskesmas Kuta Bumi melakukan penindakan di sarana distribusi obat tradisional di daerah Kuta Bumi, Kab. Tangerang, karena obat tradisional / jamu yang diedarkan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), (28/06).



Minggu ketiga Mei 2019 Balai Besar POM di Samarinda melakukan Intensifikasi Pengawasan/ Pengawasan Takjil jajanan berbuka puasa di Kabupaten Berau, dengan cara melakukan pengujian sampel produk takjil jajanan berbuka puasa.



Kantor Badan POM di Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pengawasan pangan olahan yang beredar di pasar tradisional Kota Tasikmalaya pada 18-19 Juni 2019. *Sampling* dilakukan terhadap pangan olahan yang terdiri dari mi basah, tahu, bakso, kue basah, olahan daging dan ikan, terasi, kolang-kaling, dan kerupuk.



Program pasar aman dari bahan berbahaya di Yogyakarta yang disupervisi langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo dan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta bertujuan agar komunitas pasar mampu melakukan pengawasan mandiri bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.



Program pengawasan pangan jajanan buka puasa oleh tim Balai Besar POM di Pontianak bersama jajaran Disperindagkop dan UKM, Dinas Kesehatan, Satpol PP serta Biro Humas Setda Melawi, tim Balai Besar POM di Pontianak menyambangi beberapa lokasi pasar juadah yang menjual berbagai jenis pangan jajanan khas buka puasa di Kabupaten Melawi, (27/05).



Pemeriksaan sarana distribusi pangan di minimarket, toko-toko/ritel, serta sarana distribusi pangan yang berada di wilayah Kabupaten Katingan (22/05).



Balai Besar POM di Denpasar melakukan intensifikasi pengawasan bekerja sama dengan lintas sektor terkait, dengan target utama pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak (penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain) di sarana distribusi pangan (*import/distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, serta para pembuat dan atau penjual parcel*) dan pangan jajanan untuk buka puasa/takjil (06/05).



(22/05) Kantor Badan POM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Puskesmas Pangkalan Kasai, Polsek, dan Satpol PP Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melakukan pemeriksaan bahan makanan yang dijual para pedagang di Pasar Soegih Belilas-Kabupaten Indragiri Hulu (22/05).



Amankan produk pangan tanpa izin edar, Kantor Badan POM di Kabupaten Tangerang semakin perkuat pengawasan produk beredar. Ditemukan produk pangan yang belum memiliki izin edar pada sarana produksi di kawasan industri Desa Kadu Kec Curug Kabupaten Tangerang (28/03).



Petugas Kantor Badan POM di Kota Palopo melakukan sampling dan pengujian terhadap jajanan Buka Puasa di Kab. Luwu Timur, berupa 41 sampel pangan segar seperti ikan, udang, ayam potong, tahu, dan kolang kaling. Sidak dilaksanakan di pasar dan beberapa sarana ritel pangan Kab. Luwu Timur.



"RAMADHAN TIBA"

Badan POM Intensifkan Pengawasan Pangan

Umat Islam di seluruh dunia menyambut datangnya bulan suci dengan penuh suka. Di Indonesia, hadirnya Ramadhan seringkali diiringi dengan maraknya penjualan beragam pangan berbuka puasa. Menjamurnya penjual pangan siap saji di bulan Ramadhan tak terlepas dari tingginya permintaan pangan untuk berbuka puasa. Belum lagi tingginya permintaan pangan olahan kemasan untuk bingkisan Hari Raya Idul Fitri.

Tidak jarang, tingginya permintaan ini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan pangan kedaluwarsa dan mengandung bahan berbahaya. Untuk menekan angka kejahatan di bidang pangan sekaligus dalam rangka melindungi masyarakat, Badan POM setiap tahunnya melakukan intensifikasi pengawasan pangan menjelang, saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Pada tahun 2019, Badan POM melalui 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan pangan secara intensif bersama lintas sektor terkait. Target intensifikasi pengawasan difokuskan pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, rusak, serta pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti *formalin*, *boraks*, dan pewarna dilarang (*rhodamin B* dan *methanyl yellow*).



“Badan POM tidak segan untuk menindak siapa pun yang dengan sengaja melanggar peraturan dengan melakukan kejahatan di bidang obat dan makanan,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Sebagai contoh, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan intensifikasi pengawasan pangan berupa *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap keamanan jajanan buka puasa di 9 kabupaten/kota yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Pengawasan jajanan buka puasa ini dilakukan menggunakan *rapid test kit* dengan mobil laboratorium keliling.

Sementara di Kalimantan Barat, bersama jajaran Dinas Kesehatan dan Satpol PP, tim BBPOM di Pontianak melakukan pengawasan pangan jajanan buka puasa di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 22-24 Mei 2019 lalu. Petugas gabungan menyasar beberapa lokasi seperti Pasar Baru, Pasar H. Sani, Pasar Desa Payak Kunang, dan Pasar Tuan-Tuan di Kabupaten Ketapang serta daerah Tugu Durian Sukadana dan Teluk Melano di Kabupaten Kayong Utara.

Di wilayah Bangka Belitung, petugas Balai POM di Pangkalpinang didampingi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan melakukan pemeriksaan di beberapa lokasi penjualan jajanan buka puasa yang terdapat di Kabupaten Bangka Selatan. Pengambilan sampel jajanan buka puasa dilakukan di titik-titik yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat diantaranya Simpang Lima Kelurahan Toboali, Simpang Cik Ros Kelurahan Teladan, Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Teladan, dan Jl. Perumnas Kelurahan Toboali.

Secara keseluruhan, Badan POM memeriksa 5.862 sarana ritel dan distribusi pangan di tahun 2019. Hasil pemeriksaan menemukan 519.088 kemasan produk pangan rusak, kedaluwarsa, dan ilegal atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dari 2.667 sarana distribusi dengan total nilai keekonomian mencapai lebih dari 10,38 miliar rupiah.



“Hasil intensifikasi pengawasan pangan tahun 2019 menunjukkan bahwa **pangan kedaluwarsa** banyak ditemukan di Sorong, Jayapura, Kendari, Surabaya, dan Mimika dengan jenis minuman coklat paduan, makanan ringan, kopi, mentega, dan susu kental manis. **Pangan rusak** banyak ditemukan di Sorong, Kendari, Palopo, Merauke, dan Baubau dengan jenis produk pangan yang rusak yaitu minuman berperisa, makanan ringan, susu kental manis, bumbu, dan minuman sari buah. **Pangan ilegal** banyak ditemukan di Tangerang, Baubau, Lampung, Kendari, Morotai, dan Tanjung Pinang dengan jenis produk garam, makanan ringan, cokelat, daging olahan, minuman coklat paduan, dan saus,” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih pangan yang dikonsumsi khususnya di bulan Ramadhan.

■ Moch. Rahardi Putranto



Tuan Rumah

“The 13th Session Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCCF)”



Pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang paling utama. Tak hanya soal pemenuhannya, keamanan pangan juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Untuk menjamin produk pangan aman dan berkualitas, diperlukan standar.

Untuk menyusun standar keamanan pangan secara internasional, pada tahun 1963 *World Health Organization* (WHO) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) membentuk organisasi internasional di bidang standarisasi pangan yang diberi nama *Codex Alimentarius Commission* (CAC) atau biasa disebut Codex. Codex menetapkan standar keamanan pangan melalui ketentuan higienis, bahan tambahan pangan, residu pestisida dan obat hewan, cemaran, pelabelan, metode analisis dan pengambilan sampel, serta prosedur inspeksi dan sertifikasi ekspor impor. Saat ini, 189 negara telah bergabung menjadi anggota Codex.

Indonesia, melalui Badan POM tergabung dalam keanggotaan sejak tahun 1971. Menjadi anggota Codex, Badan POM terus berperan aktif dalam pembahasan rancangan standar, termasuk dalam *Codex Committee on Contaminants in Foods* (CCCCF) yang merupakan salah satu *Codex Committee* yang mempunyai tugas menyiapkan standar pangan terkait cemaran dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan konsumen di semua negara maupun untuk kelancaran perdagangan produk pangan bagi kepentingan internasional.

Pada tahun 2019 ini, bersama WHO, FAO, dan *Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of Netherland*, Badan POM menjadi tuan rumah pertemuan tahunan “*The 13th Session Codex Committee on Contaminants in Foods* (CCCCF)” yang diselenggarakan di Yogyakarta selama 5 hari yaitu 29 April – 3 Mei. Pertemuan dihadiri oleh lebih kurang 250 orang peserta dari sekitar 60 negara anggota Codex.

Pertemuan ke-13 ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. Hadir dalam acara tersebut antara lain *Chair CCCF*, J.W. Tas (Wieke); *Vice Chair CAC*; Purwiyanto Hariyadi; *Agricultural Counselor of the Natherlands Embassy*, Louis Beijer; *Co-Chair of 13th Session of the Codex Committee on Contaminants in Foods*, Roy Sparringa; Perwakilan FAO, Markus Lipp; dan Perwakilan WHO, Kim Petersen.



Dalam sambutannya, Penny K. Lukito menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi telah dipilihnya Badan POM sebagai *co-host* CCCF ke-13 ini. “Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah CCCF semoga bisa memberikan dampak dan pengaruh langsung di masyarakat, terutama terkait pentingnya pemenuhan standar pangan sehingga dapat meningkatkan kualitas produk pangan Indonesia,” harap Penny K. Lukito.

Kepala Badan POM RI berharap pertemuan ini dapat menjadi wadah bagi para delegasi 60 negara dalam menentukan standar terkait pangan, terutama cemaran dalam pangan.

“Semoga sidang CCCF ke-13 ini bisa menjadi cerminan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi terutama dalam mendukung peran penting Codex dan menyelaraskan standar-standar terkait pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito



Pemenuhan Standar Keamanan Pangan

Sidang CCCF ke-13 ini merupakan ke dua kalinya Badan POM menjadi *co-host* penyelenggaraan sidang Codex. Sebelumnya sidang Codex diselenggarakan di Bali pada tahun 2014. Beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan pada sidang kali ini antara lain batasan *Cadmium* (Cd) pada cokelat dan produk turunannya, *Mycotoxins* pada *spices*, *Methylmercury* pada ikan, *Aflatoxins* dalam sereal dan kacang-kacangan, *Hydrogen Cyanide* pada singkong dan produk turunannya, pengurangan 3-MCPDE dan *Glycidyl esters* dalam proses pemurnian minyak goreng dan produk turunannya.

Beberapa produk ekspor Indonesia pernah mendapat penolakan dari negara tujuan ekspor. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan standar terkait batas kandungan senyawa tersebut. Melalui sidang CCCF ini, Badan POM bersama kementerian terkait dan pakar dapat aktif membahas kajian ilmiah dan bahan pendukung lainnya dalam rangka perlindungan konsumen sekaligus fasilitas perdagangan pangan.

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai *co-host* CCCF ini diharapkan memberi gaung yang besar dan kuat tentang pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan dan memperkuat koordinasi keamanan pangan di tingkat nasional, serta untuk meningkatkan kualitas produk pangan Indonesia agar dapat berdaya saing di pasar internasional. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia atas keberhasilannya menyelenggarakan *event* Codex, dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap penyelenggaraan *event-event* berskala internasional, serta dapat memajukan sektor pariwisata Indonesia, khususnya Yogyakarta.

■ Yanuar Rahman

BADAN POM BANTU REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE

PERKUAT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Sejalan dengan semangat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dan Nawacita Presiden RI Joko Widodo, dimana Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) ditempatkan sebagai program prioritas pembangunan nasional, berbagai unsur lembaga pemerintah berkomitmen untuk aktif mewujudkan program ini.

Program KSS dan Triangular (KSST) sendiri ditujukan untuk membantu negara berkembang dan secara bersamaan mengangkat citra Indonesia dalam kerja sama yang saling menguntungkan termasuk dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan solidaritas internasional, serta bertukar pengalaman dengan negara lain.

Badan POM sebagai salah satu unsur pemerintah turut berperan aktif dalam program KSST ini, diantaranya dengan memberikan bantuan-bantuan teknis seperti *training* dan *expert dispatch* bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pengawas pangan di Timor Leste, seperti yang dilaksanakan pada tahun 2018 lalu di Bali.

Pemerintah Timor-Leste menyampaikan harapannya agar dapat melakukan studi komparatif terhadap sistem pengawasan obat dan makanan yang ada di Indonesia termasuk *transfer of knowledge* melalui *expert dispatch* maupun pelatihan teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang pengawasan obat dan makanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor-Leste dalam kerangka KSS. Hal ini memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, khususnya Badan POM.



3 hal kesepakatan dalam perjanjian Badan POM dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor-Leste antara lain;

- 1** Mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kerja sama melalui pertukaran informasi mengenai regulasi keamanan dan mutu pangan yang berlaku di masing-masing negara;
- 2** Saling memberikan informasi yang berkaitan dengan pengendalian masalah keamanan dan kualitas; serta
- 3** Memberikan bantuan teknis dari Indonesia ke Timor-Leste.

Kerja sama antara Indonesia dengan Timor Leste sendiri telah dilakukan sejak tahun 2014 yang tertuang dalam nota kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis di Bidang Keamanan dan Mutu Pangan antara Badan POM dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor-Leste.

Pada tahun ini, Badan POM kembali melanjutkan Program KSS dengan AIFAESA (*Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar*) melalui dukungan fasilitasi kehadiran Delegasi AIFAESA sebagai wakil Timor-Leste pada Pertemuan *the 13th Session of Codex Committee on Contaminants in Foods* (CCCF) di Yogyakarta, 29 April sampai dengan 3 Mei 2019 lalu. AIFAESA merupakan institusi yang baru berdiri dua tahun dan diberikan kewenangan luas untuk mengawasi semua aktivitas ekonomi termasuk pengawasan pangan di Timor-Leste, oleh karena itu AIFAESA sangat membutuhkan bantuan dan kerja sama dari Badan POM sebagai institusi mitra.

Program KSS Badan POM untuk AIFAESA tahun ini, selain dilaksanakan dalam bentuk dukungan kehadiran delegasi lembaga tersebut pada Pertemuan CCCF, juga dilaksanakan melalui *knowledge sharing* tentang manajemen pengawasan pangan di Indonesia dan di Timor-Leste, serta implementasinya melalui kunjungan ke Balai Besar POM dan industri pangan/UMKM di Yogyakarta.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengatakan dukungan melalui KSS yang dilakukan Badan POM merupakan bagian dari kontribusinya sebagai regulator dan menjadi bagian dari Program Prioritas Nasional (Pro-PN) di bidang pengawasan obat dan makanan. “Dukungan ini merupakan bentuk kontribusi Badan POM sebagai regulator obat dan makanan serta menjadi bagian dari Pro-PN sekaligus mendukung perkuatan hubungan bilateral antar kedua negara, ujarinya di sela pertemuan Codex. Perkuatan kerja sama dapat menciptakan sinergitas dalam sistem pengawasan keamanan pangan di kedua negara khususnya untuk pangan ilegal di perbatasan antar negara.

Pada kesempatan yang sama, Kepala AIFAESA, Abilio Oliviera Seren menyampaikan apresiasi terhadap program KSS Badan POM yang memberikan manfaat bagi perkuatan inspektur pangan AIFAESA khususnya untuk pengawasan obat dan makanan di negaranya Timor Leste.

Dengan turut berpartisipasi Badan POM dalam KSS ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Badan POM sebagai regulator yang diakui secara internasional (*internationally recognized*). Peran Badan POM tidak hanya dilihat dari aspek pengawasan, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan peningkatan daya saing.

■ Benny Robin





Hari Keamanan Pangan Sedunia

Keamanan Pangan, Tanggung Jawab Kita Bersama

Setiap tanggal 7 Juni, dunia internasional memperingati Hari Keamanan Pangan Dunia. Agenda ini ditetapkan setelah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Food and Agriculture Organization* (FAO) menetapkan 7 Juni sebagai "World Food Safety Day" pada Desember 2018 lalu. FAO menetapkan "Keamanan Pangan Tanggung Jawab Kita Bersama (*Food Safety, Everyone's Business*)" sebagai tema *World Food Safety Day* (WSFD) pada tahun 2019.

Permasalahan keamanan pangan merupakan isu penting di dunia karena menjadi salah satu pilar kualitas dan kesehatan bangsa. Di Indonesia, masih banyak permasalahan terkait keamanan pangan seperti kesehatan yang rentan terserang penyakit, disusul masih banyak kasus yang terjadi akibat pangan yang tercemar seperti penyakit diare yang diperkirakan mencapai 10 hingga 22 juta kasus.

Indonesia juga menghadapi masalah penyakit tidak menular (PTM) yang berkaitan dengan konsumsi pangan seperti obesitas, hipertensi, diabetes atau kencing manis, serta kekurangan gizi atau gizi buruk yang dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap keamanan, mutu, gizi, dan kecukupan pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

Tak ingin kehilangan momen WSFD, Indonesia melalui Badan POM menjadi salah satu negara yang pertama menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di area *Car Free Day* (CFD) untuk menggaungkan semangat hari keamanan pangan dunia serentak di seluruh Indonesia, Minggu (30/06).

Mari kita manfaatkan Hari Keamanan Pangan Dunia ini sebagai momen untuk menggaungkan kampanye keamanan pangan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan menginspirasi upaya peningkatan keamanan pangan nasional,"

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito





Di Jakarta, kegiatan KIE dilaksanakan Badan POM bersinergi dengan berbagai lintas sektor antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Pengawasan keamanan pangan harus menjadi prioritas kita bersama seluruh masyarakat Indonesia di sepanjang jalur rantai pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan harus dilakukan secara holistik, terkoordinasi, dan sistemik di sepanjang hulu sampai hilir rantai pangan (*from farm to table*),” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. Potensi risiko bahaya terhadap keamanan pangan dapat terjadi di setiap titik rantai pangan termasuk pangan impor. “Oleh karena itu, pengawasan terhadap penerapan keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, termasuk juga kalangan akademisi/perguruan tinggi dan media,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan POM RI menjelaskan bahwa permasalahan pangan tidak hanya terkait aspek keamanan pangan saja, tetapi juga gizi. Beberapa program Badan POM terkait gizi antara lain adanya kewajiban produsen pangan untuk mencantumkan informasi nilai gizi dalam label pangan dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat bijak memilih pangan yang akan dikonsumsi sesuai kebutuhannya. Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap pangan fortifikasi seperti garam dan tepung terigu.

Kami tidak hanya berhenti pada perayaan hari keamanan pangan hari ini saja, namun sosialisasi keamanan pangan terus dilakukan. Bersama kita wujudkan Indonesia maju, terdepan dengan tingkat keamanan pangan yang unggul.”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito



Dalam perayaan WFSD yang turut dihadiri oleh Perwakilan FAO dan *World Health Organization* (WHO) Indonesia ini, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa Badan POM senantiasa berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas pemerintahan untuk memperkuat tata kelola pengawasan pangan serta terus mengembangkan sistem pengawasan pangan yang efektif untuk mewujudkan keamanan pangan di Indonesia. Badan POM siap memberikan fasilitasi perkuatan kapasitas dan pendampingan bagi para pelaku usaha pangan utamanya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan siap saji melalui berbagai program strategis yang terus dikembangkan.

■ Muhammad Rizky

Kampanye Cerdas Kosmetik Aman Bersama Kwarda Pramuka



Dewasa ini penggunaan kosmetik kian meningkat terutama bagi kaum milenial. Tuntutan gaya hidup dan pergaulan membuat setiap orang menginginkan tampil cantik. Ragam kosmetik yang ditawarkan pun sangat banyak. Data Badan POM mencatat lebih dari 50% produk yang terdaftar adalah kosmetik. Selama lima tahun terakhir, total produk kosmetik yang mendapat persetujuan izin edar Badan POM lebih dari 158 ribu produk.

Di sisi lain maraknya penjualan kosmetik *online* mempermudah konsumen memperoleh produk yang diinginkannya. Ditambah gencarnya promosi kosmetik di dunia digital oleh selebriti idola generasi milenial. Menurut "Online Seller Survey" tahun 2018 oleh Jajak Pendapat (JakPat), produk kosmetik menempati peringkat keempat produk paling populer dalam penjualan *online* setelah produk *fashion* wanita, *fashion* pria, dan elektronik termasuk *gadget*.

Penyebaran informasi serta transaksi jual beli kosmetik *online* tentu berpeluang meningkatkan peredaran kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat. Terbukti nilai temuan kosmetik ilegal yang berhasil diungkap Badan POM tahun 2018 mencapai Rp.128 Miliar.

Fenomena ini kemudian direspon Badan POM dengan membekali konsumen dengan pengetahuan menggunakan kosmetik aman. Melalui program "Kampanye Cerdas Menggunakan Kosmetik pada Generasi Milenial" yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, Badan POM memberikan edukasi terutama kepada kaum milenial agar terhindar dari jerat produk kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya.

WASPADA EFEK SAMPING KOSMETIK

Di balik manfaat kosmetik untuk mempercantik atau merawat wajah/tubuh, ada beberapa hal yang sebaiknya diwaspadai dari penggunaan kosmetik.

Beberapa bahan kosmetik dapat menyebabkan efek samping atau memicu reaksi fisiologis (alergi)



Jika selama penggunaan kosmetik muncul gejala seperti:

- Gatal-gatal
- Kemerahan
- Iritasi kulit
- Efek merugikan lain diduga akibat penggunaan kosmetik



Segera hentikan penggunaan kosmetik



Jika gejala tidak kunjung reda, hubungi tenaga medis



Laporkan efek samping penggunaan kosmetik

Tahun 2018, kampanye ini telah menjelajah 24 kota di Indonesia dengan antusiasme peserta generasi milenial yang sangat luar biasa. Kegiatan ini juga disertai dengan lomba "Ajang Kreatifitas Generasi Milenial Nusantara - Cerdas Memilih Kosmetik" menggunakan media sosial dengan peserta khusus para generasi milenial.

Kali ini Badan POM bersama Balai Besar POM di Padang menggelar edukasi kosmetik aman yang diikuti 400 orang peserta terdiri dari pelajar SMP, SMA, Mahasiswa, serta Organisasi Perangkat Daerah (24/04). Kegiatan dibuka oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat yang juga merupakan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit.

Hadir sebagai narasumber *talkshow* Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM, Maya Gustina Andarini; Direktur Pengawasan Kosmetik; Dokter Kulit dan Kelamin, Mutia Sari; Putri Indonesia Intelegensia tahun 2018, Resti Asda; serta Kepala Balai Besar POM di Padang, M. Suhendri.

Di hadapan peserta yang mayoritas berseragam Pramuka, Maya menyampaikan bahwa Badan POM tidak hanya mengintensifkan pengawasan, tapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Terutama generasi milenial yang lebih aktif menggunakan internet, khususnya untuk belanja *online*.



"Generasi milenial sangat aktif di internet, sehingga berbelanja saja melalui *online*, apalagi para wanita yang suka membeli kosmetik *online*. Namun mereka kurang memerhatikan kosmetik itu sudah berizin atau tidak, maka perlu edukasi,"

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM, Maya Gustina Andarini



Kerja Sama dengan Pramuka

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar POM di Padang dan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan di Sumatera Barat.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan POM dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor HK.08.1.54.02.17.0521 dan Nomor 001/PK-MoU/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka dalam Peningkatan Keamanan Obat dan Makanan.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat bersinergi dalam ruang lingkup Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan, peningkatan kompetensi dan keterampilan anggota Pramuka untuk menjadi fasilitator/kader keamanan Obat dan Makanan, pelaksanaan promosi keamanan, pembinaan keamanan Obat dan Makanan pada komunitas sekolah dan pedagang di lingkungan organisasi Pramuka, serta pemantauan keamanan Obat dan Makanan di masyarakat.

Secara khusus, Badan POM telah membentuk Satuan Karya Pramuka (SAKA) sebagai upaya merangkul generasi milenial untuk bergandengan tangan dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan peran aktif generasi milenial dalam pengawasan Obat dan Makanan ilegal.

■ Fathan Nur Hamidi

Generasi Milenial, Pelopor Konsumen Cerdas Menggunakan Kosmetik Aman



Saat ini teknologi *online* merupakan teknologi yang sudah tidak asing di kehidupan kita dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kita dapat mengakses informasi apa saja, dari mana saja, dan dimana saja. Bahkan dengan adanya teknologi ini, berbelanja produk atau barang dapat kita lakukan secara *online* pula. Tak heran jika belanja secara *online* menjadi tren belanja yang sedang marak dan ramai di kalangan masyarakat.

Sayangnya, ditengah santeranya perkembangan teknologi yang memberikan beragam kemudahan ini, berkembang juga penjualan produk-produk ilegal atau produk yang tak berizin edar, bahkan produk palsu, termasuk produk obat dan makanan. Dengan iming-iming harga yang murah namun khasiat atau kegunaannya sama dengan produk legal, produk-produk ini dengan cepatnya tersebar di masyarakat karena tidak bisa dipungkiri bahwa semboyan 'murah dan bagus' masih sangat kental melekat di masyarakat kita tanpa memikirkan dampak atau efek samping ke depan.



Untuk itu Badan POM perlu melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi milenial tentang produk-produk apa saja yang aman untuk dikonsumsi/digunakan, serta apa saja kandungan yang berbahaya atau berisiko bagi kesehatan, melalui Kampanye Cerdas Menggunakan Kosmetik untuk Generasi Milenial, seperti yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam pada 26 April 2019. Kota Batam dipilih sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan karena Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang ber juluk kota industri dan merupakan salah satu kota dengan letak sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional. Kota ini memiliki jarak yang dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga sangat berpotensi masuknya produk obat dan makanan dari luar negeri.

Generasi milenial adalah generasi penerus pembangunan bangsa. Maknai eksistensi diri dengan menjadi pelopor perubahan yang baik bagi lingkungan dengan berbagi informasi yang benar (bukan hoaks) dan gencarkan informasi tentang obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu”.

Kepala Badan POM RI,
Penny K. Lukito

Pada kegiatan tersebut, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengajak para milenial dan masyarakat untuk cerdas dan bijak dalam menggunakan kosmetik. “Kami berharap para generasi milenial dapat menjadi pelopor konsumen cerdas menggunakan kosmetik aman. Jadilah duta penyebaran informasi kepada keluarga, tetangga, sahabat, serta teman-teman sekolah.

Lebih lanjut Kepala Badan POM RI menyampaikan bahwa efektivitas pengawasan obat dan makanan memerlukan peran serta pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif untuk mewujudkan obat dan makanan aman di seluruh negeri. Kehadiran Balai POM di Batam merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah khususnya Badan POM untuk memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri.

■ Chandra Wino Adhanunggar





PROGRAM KEBUGARAN BADAN POM, NYALAKAN OBOR INTEGRITAS

Setiap tubuh organisasi tentunya pernah mengalami sakit. Ini ditimbulkan dari beberapa virus berbahaya yang dapat menyerang tubuh. Ada tiga virus yang sangat berbahaya: virus Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Virus ini bisa hinggap dan berkembang biak dalam tubuh organisasi. Virus itu bersumber dari mana saja, kapan saja dan tertular ke siapa saja. Bisa berawal dari staf yang mencari keuntungan, dari pejabat struktural yang berbisnis jabatan, hingga pejabat teras atas yang main mata dengan pihak lain.



Kenapa tubuh organisasi kita wajib terhindar dari tiga virus tersebut?

Virus itu dapat menyerang sistem imun tubuh organisasi kita. Sistem imun berguna supaya kita fokus melayani, terencana, berkinerja, dan menatap masa depan dalam meningkatkan performa terbaik untuk mengawasi obat dan makanan.

Adakah bukti sistem imun tubuh organisasi yang sudah rusak? Indonesia memiliki “dokter” pencegahan korupsi yang punya semua data soal organisasi dengan sistem imun tubuh yang rusak. Menurut sang dokter, kementerian/lembaga lah nomor satu yang paling banyak terkena virus korupsi. Sang dokter juga mengungkap bahwa lembaga non kementerian berada di peringkat ketiga yang paling sering menerima gratifikasi di antara lembaga eksekutif lainnya. Kronis? Tentu saja namun jangan khawatir. Indonesia juga punya “perawat” yang siap 24 jam merawat kita supaya tidak terkena virus tersebut: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB). Untuk memastikan setiap tubuh organisasi tidak terkena virus, Kemenpan RB punya para perawat handal, telaten, terlatih di setiap organisasi. Di Badan POM kita kenal sebagai Inspektur.

Badan POM merancang program kebugaran agar tubuh organisasi terhindar dari virus

Ini kisah tiga bulan terakhir. Program kebugaran pertama adalah Badan POM membuat *running track*/lintasan lari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan *jogging*, *sprint*, dan *marathon*. *Running track* ini dibuat untuk memastikan terhindar dari virus dan memperkuat sistem imun tubuh organisasi supaya akuntabel dan melayani. Badan POM membangun *running track* ini berupa zona integritas yang dibangun di empat titik: Makassar, Jayapura, Pontianak, dan Gorontalo, dan Badan POM berkomitmen akan membangun zona ini di semua kantor perwakilannya.

Prosedur yang harus dipenuhi sangat ketat, sehingga dapat dibayangkan betapa efektifnya program yang dilaksanakan oleh Badan POM dan kantor perwakilannya ini. Kita baru membicarakan zona integritas, belum membicarakan reformasi birokrasi. Untuk reformasi birokrasi, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki persentase berbeda dan ditambah dengan nilai performa organisasi, pembuatan dan implementasi tata peraturan.

Prosedur yang harus dipenuhi dalam *running track* tersebut.

- Manajemen SDM (15%),
- Pengawasan pada area perubahan (15%),
- Akuntabilitas (10%),
- Pelayanan Publik (10%),
- Manajemen Perubahan (5%),
- Tata Laksana (5%).

Saking ingin terhindar dari virus, Badan POM juga membuat ketentuan lain yaitu prestasi yang bisa diraih dalam *running track* tersebut:

- Persepsi Pelayanan Publik (20%),
- Persepsi Korupsi (15%)
- Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan (5%).

Sedangkan untuk gerakan atletiknya, Badan POM harus meraih prestasi untuk skor akuntabilitas, integritas Organisasi, dan opini BPK.

Program kebugaran kedua adalah Badan POM menjangkau dan memberikan pelatihan bagi para atlet terbaiknya dalam berkinerja. Penandatanganan Pakta Integritas CPNS sebagai komitmen bersama para atlet baru dalam hal ini CPNS untuk berkinerja dengan integritas, akuntabilitas, dan komitmen melayani publik yang tinggi.

Untuk memastikan setiap program dilaksanakan dan semua atlet berkomitmen, Badan POM juga memiliki program kebugaran ketiga yaitu menyelenggarakan pertemuan rutin yang mengumpulkan semua atlet dan memastikan setiap vitamin dan gizi yang dapat memperkuat sistem imun tubuh.

Pada 15 Mei 2019, Badan POM menyelenggarakan pertemuan nasional sosialisasi RB yang dihadiri seluruh Pimpinan, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan ini mendatangkan para dokter yang handal dalam mencegah virus KKN menyerang tubuh Organisasi, yakni: KEMENPAN RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman.



Untuk memastikan vitamin dan gizi organisasi, Badan POM juga membuat berbagai seminar untuk berfokus pada jenis gizi apa saja yang harus dikonsumsi tubuh Organisasi misalnya Sosialisasi *Tools Survey Kepuasan* dan Indeks Kepatuhan, Sosialisasi Hasil Tinjau Ulang Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro Badan POM serta penerapan *Quality Management System (QMS) ISO 9001:2015*.

Tiga program kebugaran ini membuat Badan POM mendapatkan penghargaan dalam olimpiade. Badan POM meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Tahun 2018. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah salah satu penghargaan tertinggi bagi lembaga yang bisa menunjukkan sistem imun tubuh organisasi yang sehat dan ASN yang terbebas dari virus KKN. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diukur dari laporan keuangan yang patuh pada standar akuntansi, kecukupan bukti, patuh pada perundang-undangan dan memiliki sistem pengendalian intern. Prestasi ini telah dipertahankan Badan POM dengan meraihnya selama 5 tahun berturut-turut, sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Badan POM.

Penghargaan tertinggi lain juga diperoleh oleh Badan POM. Perolehan indeks RB sebesar 77,65 yang termasuk dalam kategori "BB" atau sangat baik. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 1,29 dari tahun 2017.

Empat organisasi dalam tubuh Badan POM tempat lahirnya atlet-atlet ASN terbaik dalam berkinerja dibuktikan dengan meraih predikat WBK yaitu Direktorat Registrasi Pangan Olahan; Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor; Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan; dan Balai Besar POM di Surabaya. Badan POM masih akan melahirkan tubuh-tubuh organisasi yang sehat dan ASN yang terbebas dari virus KKN. Badan POM akan segera menampilkan atlet terbaik lainnya di olimpiade-olimpiade mendatang yang bisa dimenangkan oleh Badan POM!





Badan POM, *National Coordinator* Operasi Opson VIII-2019: 61 Miliar Rupiah Pangan Ilegal Disita

Operasi Opson merupakan operasi global di bawah koordinasi *International Criminal Police Organization* (ICPO)-INTERPOL Lyon, Perancis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberantas jaringan kejahatan terorganisir di balik perdagangan pangan segar dan pangan olahan ilegal, dan/atau tidak memenuhi persyaratan dan keamanan. Operasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergitas antara penegak hukum dengan pihak berwenang terkait, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pangan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Operasi Opson pertama kali digelar pada tahun 2011 yang diinisiasi oleh Interpol. Tahun ini merupakan tahun ke-empat Indonesia berpartisipasi aktif, dimana Badan POM ditunjuk sebagai *National Coordinator* Operasi Opson VIII-2019.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Pusat termasuk 33 Balai Besar/ Balai POM dan 40 Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota bersama Direktorat Jenderal Bea & Cukai serta Kementerian Pertanian serentak melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan penindakan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi pangan segar dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2019. Selama 6 minggu tersebut, petugas berhasil menyita 1.606 item (826.929 *pieces*) pangan segar dan pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal dan tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dari 425 sarana yang diperiksa, dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 61 miliar rupiah.

“Telah banyak korban jiwa akibat minuman ilegal ini. Sama halnya seperti narkoba, minuman beralkohol ilegal dapat menyebabkan ketagihan yang merusak generasi bangsa, karena itu, kita harus memutus mata rantai produksi dan distribusi minuman beralkohol ilegal ini,”

Kepala Badan POM RI,
Penny K. Lukito

Bertempat di Badan POM (05/04/19) Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bersama Sekretaris *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia, Brigjen Napoleon Bonaparte serta Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Bahaduri Wijayanta Bakti Mukarta memberikan keterangan kepada media terkait hasil Operasi Opson tersebut.

Dibandingkan hasil Operasi Opson tahun-tahun sebelumnya, hasil temuan Operasi Opson VIII-2019 yang menonjol adalah produk pangan kedaluwarsa yang dikemas ulang dan produk minuman beralkohol ilegal. Penny K. Lukito menjelaskan temuan didominasi *snack* (biskuit, wafer, dll.) yang sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Setelah mengemas ulang produk, pelaku kemudian mengubah tanggal kedaluwarsa," ungkap Kepala Badan POM RI. Pelaku juga mengedarkan pangan olahan ilegal yang diimpor melalui ekspedisi jalur laut dan mengedarkan pangan tidak memenuhi persyaratan atau mengandung bahan berbahaya yang diproduksi di dalam negeri. Selain itu, ditemukan juga 1.000 drum minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal di daerah Jakarta Barat.

Hasil temuan Operasi Opson ini akan ditindak lanjuti secara *pro-justitia*. Diharapkan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, sehingga kejahatan di bidang obat dan makanan dapat berkurang. Kepala Badan POM RI juga menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terutama di wilayah perbatasan negara untuk mencegah masuknya produk ilegal. "Kami akan terus mengaktifkan Kantor Badan POM di perbatasan, dan mengintensifkan kerja sama pengawasan," ucapnya.



Apresiasi untuk Badan POM

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Napoleon Bonaparte mengapresiasi kinerja Badan POM atas peran aktifnya dalam berbagai operasi internasional. "Badan POM merupakan salah satu instansi tertinggi dalam upaya memberantas kejahatan obat dan makanan lintas negara. Ini bukti kerja nyata, dan akan terus kita lanjutkan dengan memperkuat tim koordinasi Interpol Indonesia," jelasnya.

Senada dengan Napoleon Bonaparte, Bahaduri Wijayanta Bakti Mukarta dari Ditjen Bea & Cukai mengatakan akan mendorong seluruh jajaran Bea & Cukai untuk fokus pemberantasan peredaran pangan segar dan pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi syarat keamanan. "Sinergi dengan Badan POM, Kepolisian, dan Badan Karantina kami lakukan untuk menyukseskan Operasi Opson," jelasnya.

Badan POM memastikan setiap pelanggaran kejahatan pangan di Indonesia akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Untuk memberikan efek jera dan sanksi tegas, diperlukan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari kejahatan di bidang obat dan makanan.

■ Hendriq Fauzan Kusfanto





FITOFARMAKA DAN PRODUK BIOLOGI, DUA KOMODITI POTENSIAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN LEBIH

Perkembangan industri obat dan makanan, terutama obat berbahan baku alam (fitofarmaka) dan produk biologi saat ini tengah menjadi perhatian Badan POM. Produk fitofarmaka dan produk biologi memang menjadi dua komoditi yang potensial untuk terus dikembangkan dan dimanfaatkan dalam dunia pengobatan.

Fitofarmaka adalah sediaan obat yang bahan bakunya berupa simplisia atau sediaan galenik bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah melalui uji preklinik dan uji klinik. Dengan *biodiversity* dari sumber daya alam di Indonesia, tentunya akan membuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan bahan-bahan alam tersebut menjadi berbagai jenis produk fitofarmaka. Sementara produk biologi pun tengah berkembang pesat sebagai salah satu metode terapi di bidang kesehatan.



Untuk menindaklanjutinya, Badan POM diinstruksikan untuk memfasilitasi pengembangan obat, mendukung investasi pada sektor industri farmasi, serta mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku, melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) terkait pengembangan kedua produk tersebut. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Selain itu, Badan POM juga menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi dan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka dengan bersinergi antar Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, dan pelaku usaha. Satgas ini merupakan prioritas untuk hilirisasi pengembangan hasil penelitian obat bahan alam dan juga produk biologi, mulai dari bidang bahan baku, teknologi manufaktur dan standardisasi, uji preklinik dan uji klinik, pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, hingga produksi dan promosi produk jadi.

Pada saat memimpin Rapat Pleno Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi (11/04) yang dihadiri oleh jajaran internal Badan POM dan perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, Industri Farmasi, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Rumah Sakit, dan Palang Merah Indonesia (PMI), Kepala Badan POM RI menyampaikan bahwa mayoritas bahan baku obat masih diperoleh dengan cara impor. "Perlu ada penelitian-penelitian yang berkelanjutan terkait bahan baku obat di samping bahan baku kimia", tukasnya.

Prof. Dr. Elly Wahyuddin yang merupakan perwakilan dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) juga menyampaikan bahwa masih banyak penelitian yang dilakukan oleh Universitas/ Perguruan Tinggi, pada akhirnya tidak ada tindak lanjutnya, sehingga perlu ada pencerahan. Hal ini disampaikan beliau pada saat berkesempatan melakukan kunjungan ke Badan POM dan berdialog langsung dengan Kepala Badan POM RI untuk membahas mengenai hilirisasi pengembangan produk fitofarmaka dan produk biologi sebagai *life science products* atau produk untuk meningkatkan kualitas hidup (14/05). “Banyak kendala yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi, salah satunya terkait masih banyaknya penelitian yang dihasilkan, namun belum sesuai dengan kebutuhan. Tumpang tindih antara satu penelitian dengan yang lain dan tidak berlanjut (belum terhilirisasi),” ungkapnya.

Dengan terbentuknya kedua Satgas ini diharapkan dapat menjembatani kebutuhan terkait pengembangan kedua produk tersebut.

■ Dian Hermawati



“Saya harap, satgas ini menjadi salah satu solusi dari kendala-kendala yang dihadapi dalam proses hilirisasi inovasi dari peneliti atau riset, seperti sumber daya anggaran dan peralatan, jaringan, serta pendampingan. K/L terkait juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran sesuai bidang kerjanya masing-masing”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

LINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MEMASTIKAN OBAT JKN AMAN DAN BERKUALITAS



Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan sosial kesehatan nasional, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi-JK, program JKN masuk dalam Nawacita ke-5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per Juli 2019 jumlah peserta JKN mencapai 222.463.022 orang. Banyaknya jumlah peserta JKN berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan obat pasien JKN. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat JKN yang aman dan bermutu.

Perbaikan pengadaan Obat JKN terus dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya pada akhir Desember 2018 telah diselenggarakan pertemuan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kementerian Kesehatan bersama Badan POM, LKPP, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) dalam rangka membahas perbaikan kriteria obat yang akan masuk e-Katalog Obat JKN.

Badan POM sebagai Lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan mempunyai peran yang sangat vital dalam melindungi kesehatan ratusan juta nyawa penduduk Indonesia. Berbagai upaya perkuatan dilakukan Badan POM, terutama terkait Obat JKN. Selasa (23/04) Badan POM menyelenggarakan kegiatan *Sounding Rekomendasi Pemilihan Penyedia Obat* untuk JKN sebagai upaya perkuatan pengawasan obat.

Bertempat di Swissbell Hotel Jakarta, acara dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang dilanjutkan pemaparan Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan, Engko Sosialine Magdalene, serta Plt. Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (ONPPZA) Badan POM, Rita Endang.

Beberapa asosiasi seperti *International Pharmaceutical Manufacturers Group* (IPMG), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), serta beberapa industri farmasi dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang ikut dalam e-katalog hadir dalam pertemuan ini. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar pelaku usaha dapat memahami alat penilaian kepatuhan pelaku usaha dalam konsep *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) sekaligus sebagai bentuk dukungan Badan POM kepada industri farmasi di Indonesia.



Peran Badan POM

Dalam melakukan penilaian, pemerintah memiliki kriteria pemilihan e-katalog Obat JKN antara lain memiliki NIE dari Badan POM, memiliki jaringan distribusi obat di 34 Provinsi, dan harga. Ke depannya untuk periode JKN di tahun 2020, dengan pendekatan MCDA akan ditambahkan kriteria *compliance* Industri Farmasi berdasarkan data hasil pengawasan *post market* Badan POM.

Tantangan Badan POM pada era JKN adalah memastikan kualitas obat yang digunakan untuk program JKN dengan cara melakukan pengawasan mulai dari produsen pada saat obat dibuat sampai ke hilir pada saat obat digunakan oleh masyarakat.

Badan POM mempunyai tugas memberikan rekomendasi obat yang bisa masuk e-katalog obat JKN berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan penetapan Kriteria *Compliance* untuk Pemilihan Obat JKN dan pembentukan Komite Pengkajian Hasil Pengawasan Penyedia Obat JKN. .

Sampel obat dan makanan yang telah *disampling* selanjutnya dilakukan uji laboratorium sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil *sampling* dan pengujian ditemukan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dilakukan tindak lanjut/ *regulatory action* yang dapat berupa pemberian sanksi perintah penarikan obat dan makanan TMS (*recall*), peringatan, peringatan keras, hingga penghentian sementara kegiatan. Untuk Industri Farmasi dilakukan komunikasi risiko kepada *stakeholder* terutama terkait obat JKN yang ditemukan TMS di peredaran sehingga perlu dikomunikasikan kepada pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan dan LKPP.

Sebagai upaya pengawalan mutu obat JKN di peredaran, Badan POM sejak tahun 2017 meningkatkan cakupan *sampling* obat JKN dari 50% (2017) menjadi 55% (2018) dan hingga 60% (2019) dihitung dari total sampel rutin. *Sampling* obat JKN dapat dilakukan baik di sarana pelayanan kefarmasian milik pemerintah maupun swasta yang bekerja sama dengan BPJS.

■ Bayu Kresna Septianto Anggoro

“Badan POM berkomitmen untuk terus membuka dialog terkait Obat JKN, mendampingi jalannya riset dan pengembangan inovasi bioteknologi, membantu percepatan registrasi obat dengan penerapan *reliance* dan menghilangkan *Approvable Letter* yang sudah kami diskusikan, serta percepatan sertifikasi CPOB dan CDOB khususnya di daerah terpencil,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito





DORONG PENGEMBANGAN PRODUK JAMU DAN SUPLEMEN KESEHATAN

Gaya hidup yang semakin dinamis membuat seseorang dituntut untuk mengeluarkan energi yang lebih besar agar aktivitas dapat berjalan dengan baik. Dalam menjaga stamina, selain mengonsumsi makanan yang sehat, masyarakat kerap mengonsumsi asupan tambahan seperti Jamu dan Suplemen Kesehatan.

Industri Jamu dan Suplemen Kesehatan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat yang peduli kesehatan, bahkan beberapa negara maju telah meneliti penggunaan Suplemen Kesehatan berpengaruh terhadap menurunnya biaya pengobatan. “Mengingat pangsa pasar kedua produk ini sangat besar di Indonesia, sehingga sangat diperlukan peran pemerintah selaku regulator untuk memfasilitasi pengembangan produk. Berbagai program strategis untuk akselerasi pengembangan produk obat herbal, fitofarmaka, dan jamu juga akan terus didorong,” tegas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat menerima audiensi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional (GP Jamu) bersama Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) di Badan POM, Selasa (14/05).



Pertemuan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing produk Jamu dan Suplemen Kesehatan di pasaran. Pihak asosiasi menyampaikan beberapa masukan mulai dari proses registrasi produk sampai dengan permohonan dukungan pengembangan produk Jamu dan Suplemen Kesehatan.

Beberapa terobosan telah dilaksanakan Badan POM untuk mendukung pengembangan UMKM jamu dan usaha jamu gendong, diantaranya meningkatkan daya saing UMKM jamu dengan mengadakan program pembinaan dan pendampingan, menginisiasi industri obat tradisional menjadi Bapak Angkat bagi UMKM Jamu/Usaha Jamu Gendong, memperkenalkan sistem penjualan jamu *online* kepada para pelaku UMKM Jamu/Usaha Jamu Gendong dan generasi milenial, serta memasyarakatkan minum jamu dengan membudayakan “Minum Jamu Bersama” pada setiap acara-acara resmi. Di samping itu Badan POM ikut mengkampanyekan penggunaan produk yang aman, terutama produk jamu kepada generasi milenial, sehingga Badan POM berharap peran serta asosiasi pelaku usaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing industrinya.



”
Badan POM sangat konsen untuk mengembangkan produk jamu mendunia. Sebagai contoh produk herbal ginseng asal China yang bisa dikenal luas. Indonesia dengan kekayaan alamnya sebagai bahan herbal tentu bisa lebih dari itu
”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Badan POM dalam kaitan deregulasi pelayanan publik, perbaikan produktivitas pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat, perkuatan penegakan hukum, dan perbaikan tata kelola pemerintah. Sebagai contoh, Badan POM telah melakukan percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pembentukan Satuan Tugas yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, dan Pelaku Usaha.

Badan POM menerima semua gagasan yang disampaikan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengawasan sekaligus mendukung pengembangan produk nasional. Badan POM telah dan akan terus meninjau kembali peraturan dan standar yang ada dengan berbagai ahli di bidangnya. Termasuk prosedur registrasi, jika bisa disederhanakan, maka akan dilakukan debirokratisasi dan deregulasi untuk mempercepat proses perizinan, sehingga produk nasional bisa cepat beredar di pasaran. “Meski demikian faktor keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk harus tetap menjadi prioritas,” tutupnya.

■ Grace Meity Ariani dan Tri Kuswantoro



PERJANJIAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR

April-Mei-Juni



7 Kerja Sama dengan
Perguruan Tinggi



5 Kerja Sama dengan
Pemerintah Daerah



2 Kerja Sama dengan
Organisasi Masyarakat



1 Kerja Sama dengan
Pihak Swasta



6 Kerja Sama dengan
Kementerian/Lembaga

Penandatanganan	Tentang
Kesepakatan Bersama Balai Besar POM dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu
Perjanjian Kerja Sama Badan POM dengan Bank Mandiri	Layanan Mandiri PayRoll Package
Kesepakatan Bersama Balai POM dengan Universitas Muhammadiyah Gorontalo	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kesepakatan Bersama Balai POM dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo	Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kesepakatan Bersama Balai Besar POM dengan Pemerintah Kabupaten Nias Barat	Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kabupaten Nias Barat
Kesepakatan Bersama Balai Besar POM dengan Pemerintah Kota Pematangsiantar	Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Kesepakatan Bersama Balai Besar POM dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Pengawasan Obat dan Makanan di Destinasi Wisata Danau Toba
Kesepakatan Bersama Balai Besar POM dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Pengawasan Obat dan Makanan di Destinasi Wisata Danau Toba
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Universitas Sahid	Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Universitas Terbuka Batam	Pemberdayaan dan Pengembangan mahasiswa Dalam Mendukung Pengawasan Obat dan Makanan
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Riau	Pengawasan Isi Siaran Terkait Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan di Kepulauan Riau
Kesepakatan Bersama Balai Besar POM dengan Pemerintah Kabupaten Nias	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Pemerintah Kabupaten Bangka	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Wilayah Kabupaten Bangka
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia	Dukungan Intelijen Dalam Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Universitas Wira Wacana	Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Serang	
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah	
Kesepakatan Bersama Badan dengan BAIS TNI	Pengembangan Jejaring Intelijen Dalam Rangka Pemberantasan Kejahatan Intelijen Dalam Rangka Pemberantasan Kejahatan Obat dan Makanan
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Dharmawanita Persatuan	
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan Akademi Analis Farmasi dan Makanan	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
Kesepakatan Bersama Badan POM dengan IPB	Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

Kerjasama Selatan-Selatan Indonesia - Papua Nugini Badan POM Kunjungi Perbatasan Vanimo



Peredaran Obat dan Makanan di wilayah perbatasan terus menjadi fokus pengawasan Badan POM. Tak hanya bermitra dengan pemerintah daerah, Badan POM juga menjalin kerja sama dengan negara tetangga. Melalui program Kerjasama Selatan – Selatan (KSS), Badan POM membangun kemitraan dengan Papua Nugini untuk meningkatkan pengamanan produk obat di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Badan POM menyelenggarakan program dukungan pengembangan sistem pengawasan obat di Papua Nugini kepada *West Sepik Provincial Health Authority* dan *National Departement of Health*, Papua Nugini pada 18-20 Juni 2019 di Jayapura. Program KSS itu bertujuan memperkuat sistem pengawasan obat kepada otoritas kesehatan Papua Nugini yang saat ini belum memiliki lembaga pengawas obat dan menentukan prioritas kebutuhan regulator terhadap pemenuhan obat yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara SKOUW dan Rumah Sakit (RS) Vanimo Papua Nugini (19/06). Kepala Badan POM RI berharap kunjungan ini dapat mempertegas kesiapan Badan POM dalam mengawal keamanan obat di wilayah perbatasan, sekaligus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini.

Penny K. Lukito mengingatkan Badan POM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan.

Kunjungan kerja Badan POM dengan Otoritas Kesehatan Papua Nugini di RS Vanimo bertujuan mengidentifikasi kebutuhan obat yang diperlukan RS Vanimo. Dalam pertemuan juga dilakukan penjajakan kerja sama untuk memasok obat ke Papua Nugini. Hal ini untuk dapat membantu pemenuhan obat yang efektif dan terjangkau serta mengurangi angka peredaran obat ilegal di wilayah perbatasan.





Buka Peluang Ekspor Obat

Melihat kebutuhan obat di RS Vanimo, Indonesia mempunyai peluang besar memasukkan produk farmasi ke Vanimo. Pasalnya rumah sakit di Vanimo masih mengalami keterbatasan akses obat dan pelayanan kesehatan yang harus menunggu kiriman dari otoritas di Port Moresby. Akibatnya waktu pengiriman lebih lama dibandingkan apabila terdapat pasokan obat dari Jayapura.

Konsulat Jendral Republik Indonesia di Vanimo, Abrahah Lebelauw menceritakan bahwa pihak RS Vanimo sangat berterima kasih kepada Indonesia karena telah banyak membantu di bidang kesehatan dan bisa menjadi potensi untuk memasukkan produk farmasi Indonesia ke Papua Nugini.

“Indonesia merupakan tetangga yang sudah banyak sekali menolong khususnya di bidang kesehatan. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi tinggi atas kunjungan Kepala Badan POM RI, karena ibu Penny K. Lukito adalah pemimpin perempuan pertama yang mengunjungi kami di Vanimo,” ungkap Abrahah Lebelauw.

Pihaknya mengusulkan Indonesia dapat mengupayakan suatu perjanjian kerja sama yang dapat memfasilitasi akses obat Indonesia ke RS Vanimo. Terlebih dengan adanya dukungan dari CEO Vanimo dan Gubernur *West Sepik* untuk menjadikan Indonesia sebagai pemasok obat di RS Vanimo. Saat ini telah ada kerja sama RS Vanimo dengan RSUD Jayapura Dok II, diantaranya untuk sterilisasi peralatan operasi.

Setelah kunjungan ke Vanimo, Kepala Badan POM RI melakukan diskusi intensif terkait potensi dan kerja sama yang perlu dikembangkan dengan negara tetangga Papua Nugini. Dalam diskusi tersebut, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri mengharapkan dukungan Badan POM dalam melakukan diplomasi ekonomi.

“Badan POM berperan untuk mendukung Kementerian Luar Negeri mewujudkan diplomasi ekonomi, bagaimana BUMN atau swasta dapat melakukan ekspansi bisnisnya karena mempunyai potensi di beberapa negara seperti Fiji, Caledonia Baru, dan negara-negara kawasan Pasifik lainnya. Kami siap membantu apa yang menjadi niat Badan POM,” ujar Santo Darmosumarto.

Kepala Badan POM RI berharap KSS Badan POM untuk Papua Nugini tahun 2019 dapat memberikan manfaat yang nyata bagi Badan POM dan Otoritas Regulator Obat Papua Nugini. “Kami juga berharap kegiatan ini dapat mendorong industri farmasi Indonesia berkontribusi dalam mendukung ketersediaan obat yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Papua Nugini,” tutupnya.

■ Fathan Nur Hamidi





PRESTASI

BADAN POM PERTAJAM PENGAWASAN INTERN



Badan POM menoreh prestasi dengan capaian maturitas SPIP level 3 dan penilaian kapabilitas APIP yang berada pada level 3 Penuh. Hal ini membuktikan praktik profesional audit internal telah diterapkan seragam dan selaras sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Banyak yang belum memahami pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam suatu pemerintahan. APIP dilakukan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan pengawasan intern (audit intern) yakni dalam menilai maturitas (dapat diartikan kedewasaan atau kematangan) sekaligus mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada instansi masing-masing.

Tingkat maturitas sendiri digunakan sebagai alat evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan atas sistem pengendalian intern. Sederhananya, maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya maka dapat dikatakan semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut.

Pemerintah targetkan maturitas SPIP capai level 3 dari skala 1-5

Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, “Tingkat Kematangan Implementasi SPIP” ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 di tahun 2019. Target ini ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertindak selaku instansi pembina penyelenggaraan SPIP.

Sejalan dengan sasaran pemerintah, Badan POM telah mencapai maturitas SPIP level 3 pada 5 Mei 2018, lebih cepat dari target nasional yaitu tahun 2019. Maturitas SPIP level 3 menunjukkan bahwa Badan POM telah memberikan kualitas yang baik dari sistem pengendalian intern yaitu dengan tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Badan POM, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain SPIP yang mencapai level 3, hasil evaluasi BPKP juga menerangkan penilaian kapabilitas APIP pada Inspektorat Utama Badan POM Tahun 2018 telah berada pada “Level 3 Penuh” (*Integrated*). Tercapainya level 3 penuh menandakan bahwa Badan POM telah melaksanakan praktik profesional audit internal secara seragam dan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

“Kami mengapresiasi Badan POM atas tercapainya Kapabilitas APIP Level 3 penuh,” ujar Kepala BPKP, Ardan Adiperdana dalam sambutannya sebelum menyerahkan langsung Piagam Penghargaan Level 3 Penuh kepada Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito pada acara Lokakarya Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kecurangan dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan POM, Jakarta (02/05/19).

Selanjutnya, APIP akan mengintensifkan audit *performance* untuk masukan perbaikan dan *assessment* kapasitas kepemimpinan dan manajerial Pimpinan Unit Kerja. APIP juga akan mengaplikasikan audit program/kegiatan strategis di Badan POM yang sudah lama ada, antara lain Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE), Program Keamanan Pangan, dan sebagainya.



“Pencapaian level 3 ini layak diapresiasi karena secara nasional, sekitar 50% saja K/L maupun pemerintah daerah yang dapat mencapai level tersebut”.

Ardan Adiperdana

Rencana Pengendalian Kecurangan

Untuk menjaga serta meningkatkan integritas segenap jajaran di lingkungan Badan POM, telah diterapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan /*Fraud Control Plan* (FCP) yang dalam proses penerapannya, akan dibimbing langsung oleh BPKP.

“Saya menyambut baik rencana pengendalian kecurangan yang akan terus dikembangkan dibawah bimbingan dari BPKP, bukan karena ada kebocoran namun karena Badan POM memiliki potensi godaan atau *temptation* dalam memberikan pelayanan publik yang terkait dengan industri Obat dan Makanan,” ujar Kepala Badan POM RI saat menjelaskan alasan diperlukannya sistem penguatan secara internal.

Penyusunan rencana pengendalian kecurangan di Badan POM sendiri bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan risiko terjadinya korupsi, memberikan keyakinan memadai terhadap pengendalian intern, dan mengembangkan budaya organisasi anti korupsi di lingkungan Badan POM.

Saat penandatanganan Nota Kesepahaman Badan POM dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan POM tahun 2018, dibahas juga upaya pembangunan FCP tersebut. Sekaligus sebagai langkah konkrit tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut sebagai tahapan penerapan FCP tahun 2019, yang akan dilanjutkan dengan penilaian risiko kecurangan, bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan FCP.

■ Devi Oktaviani

GALERI BADAN POM



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menjelaskan kepada awak media terkait temuan Pangan Ilegal dan tidak memenuhi syarat pada Konferensi Pers Operasi OPSON 2019 yang diadakan di kantor Badan POM (05/04).



Forum Komunikasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri, Serpong (24/04). Forum Komunikasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai wadah komunikasi antara unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis di daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan untuk mengawal Inpres No. 3/2017.



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bersama seluruh peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan Obat dan Makanan, berfoto bersama usai Kepala Badan POM RI memberikan arahan pada penutupan acara (09/04).



Penandatanganan Kesepakatan Bersama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat antara Badan POM dengan Universitas Sahid Jakarta pada acara peringatan Dies Natalis Universitas Sahid Jakarta ke-31 di Hotel Grand Sahid (25/04). Hal ini menunjukkan bahwa Badan POM selalu terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.



Sebanyak 250 delegasi dari 60 negara peserta sidang *The 13th Session Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)* disambut Jamuan Makan Malam dan Pertunjukan Budaya oleh Sekretaris Daerah Yogyakarta, Gatot Saptadi dan jajaran Pimpinan Badan POM. Para tamu diajak menikmati budaya Jawa dalam suasana santai dan penuh keakraban di Bangsal Kepatihan Yogyakarta (29/04).



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bersama Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyaksikan penandatanganan komitmen bersama Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kecurangan dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan POM, (02/05)



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito memberikan penghargaan kepada Unit kerja di Badan POM yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada acara Lokakarya Reformasi Birokrasi, Pengendalian Kecurangan dan Pencegahan Korupsi di lingkungan Badan POM (02/05).



Pertemuan Nasional Internalisasi Reformasi Birokrasi (RB) yang dihadiri seluruh Pimpinan Badan POM, baik di pusat maupun di daerah, dan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Anggota Ombudsman (15/05).



Konferensi pers pengawasan pangan selama Ramadhan yang digelar di kantor Badan POM, (20/05). Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa pengawasan intensif ini dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat (TMS) sekaligus melindungi masyarakat dari mengonsumsi produk tersebut selama bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri.



Pulau Sumba memiliki banyak pintu masuk melalui laut yang dapat menjadi akses peredaran obat dan makanan ilegal. Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah memastikan negara hadir di seluruh pelosok negeri, Kepala Badan POM, Penny K. Lukito melakukan penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (25/06).

GALERI BADAN POM



Gelar Konferensi Pers Pengawasan Pangan selama Ramadhan, Badan POM bersama Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyita 190.000 *sachet* produk kopi yang diduga telah diubah 2 digit tahun kedaluwarsa serta menggunting label kedaluwarsa pada kemasan sachet produk pangan (20/05).



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menunjukkan Produk Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dihadapan awak media (20/05). Kepala Badan POM menegaskan bahwa Badan POM akan mencabut Nomor Izin Edar (NIE) produk pangan TMS tersebut karena melakukan pelanggaran administratif dan pidana, serta menindaklanjuti dengan *pro-justitia*.



Seluruh jajaran Badan POM melaksanakan upacara bendera, tepat pada peringatan 111 tahun Kebangkitan Bangsa Indonesia. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito sebagai Inspektur Upacara (20/05).



Penempelan *post-it* berisi pesan, harapan, dan doa oleh para pegawai sesuai melaksanakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila yang ke-74, (01/06). Kepala Badan POM RI mengajak seluruh pegawai agar menyampaikan harapannya secara tertulis, sebagai salah satu bentuk merajut kembali tali persaudaraan.



Post-it yang berisi pesan, harapan, dan doa dari seluruh pegawai Badan POM sesuai melaksanakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila yang ke-74, (1/6). Kepala Badan POM RI berpesan agar masyarakat terus-menerus dan konsisten mengamalkan nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia.



Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan kepada Kepala Badan POM RI (24/6). BPK dengan penuh keyakinan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Badan POM yang berhasil mempertahankannya selama 5 tahun berturut-turut.



Peringati Hari Keamanan Pangan Dunia, Badan POM ajak Pengunjung *Car Free Day* di kawasan FX Sudirman, Jakarta untuk peduli pangan aman. Gaung semangat Hari Keamanan Pangan Dunia serentak dilaksanakan Badan POM secara bersamaan di Area CFD seluruh Indonesia (30/6)



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, lakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka Hari Keamanan Pangan Dunia (30/6). KIE dipandu oleh Kemal, dengan narasumber Prof. Hardinsyah selaku ahli gizi, dan bintang tamu, dr. Reisa Broto, yang membahas tentang makanan yang bergizi dan sehat untuk dikonsumsi masyarakat.



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bersama Sekretaris Daerah, R. Sabrina yang mewakili Gubernur Sumatera Utara membuka acara secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengawasan Obat dan Makanan, (8/4). Selain diikuti oleh seluruh jajaran Badan POM baik di Pusat maupun Daerah, Rakernas juga dihadiri oleh Jajaran Pimpinan Daerah di Sumatera Utara, Perwakilan Masyarakat, dan Akademisi di Sumatera Utara.



Untuk menjalin silaturahmi dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1440H, Badan POM menggelar Halal bihalal bersama puluhan insan pers di Kantor BPOM, Jakarta (14/6). Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito meminta dukungan rekan media untuk bersama mengedukasi masyarakat, termasuk konsumen dan pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam memastikan obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan adalah produk yang aman, bermanfaat, dan bermutu.



Dalam rangka mendukung usaha Pemerintah melakukan perbaikan terhadap pengadaan Obat JKN melalui e-katalog dengan menggunakan *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA), Badan POM menyelenggarakan kegiatan *Sounding* Rekomendasi Pemilihan Penyedia Obat untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (23/4) di Jakarta.

#BPOM RI

Kita Kuat Karena
Bersatu, dan Kita
Bersatu Karena Kuat.
Jaya Pemuda Pancasila!
#BulanPancasila

“Pancasila adalah energi untuk menerapkan kinerja birokrasi, serta pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat”.

Penny K. Lukito, 1 Juli 2019

BADAN POM TEGUHKAN KOMITMEN PANCASILAIS

Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Badan POM kali ini dimaknai dengan hal yang berbeda. Setelah melakukan upacara seluruh jajaran membangun suatu komitmen bersama. “Masing-masing menuliskan di *post-it* menumpahkan harapan, kesan dan doa yang positif, bagaimana kita bersama-sama sebagai suatu bangsa melangkah ke depan melalui berbagai proses demokrasi yang baru saja kita lalui, dan terus berjuang untuk menjadi suatu bangsa yang terus bersatu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam segala perilaku kita sehari-hari sebagai insan dan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia,” tegas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito usai menjadi Inspektur Upacara.

Peran Badan POM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan membangun daya saing bangsa perlu didukung oleh pemimpin-pemimpin Pancasila, yaitu pemimpin yang beriman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendahulukan kepentingan Bangsa, membangun Bangsa yang adil dan sejahtera, serta menghargai keberagaman.



Badan POM di seluruh pelosok nusantara meneguhkan komitmen untuk berada di depan, berkontribusi dan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan bangsa yang besar. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kini tugas kita untuk terus berupaya merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. “Seluruh jajaran Badan POM harus terus-menerus dan konsisten mengamalkan nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup yang dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Peringatan #BulanPancasila 1 Juli ini merupakan momentum mengenang dan merefleksikan sejarah, dimana pendiri bangsa berhasil menggali nilai fundamental negara sehingga dapat bersatu padu sebagai satu bangsa.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, perlu membumikan dasar negara Pancasila sebagai berikut:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa		Badan POM menjamin produk obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Badan POM melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		Pengawasan yang dilakukan Badan POM pada hakikatnya berbasis pada aspek membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengawasan Badan POM dilakukan agar seluruh masyarakat dapat mengonsumsi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Akses yang harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal segregasi, strata ekonomi dan sosial.
Sila Persatuan Indonesia		Badan POM merekatkan ke-Indonesiaan dengan hadir di titik manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Badan POM sebagai representasi kehadiran negara di seluruh wilayah NKRI.
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan		Pengawasan obat dan makanan mencakup aspek yang luas dan kompleks terkait banyak ragam <i>stakeholders</i> atau kelompok kepentingan. Di sisi lain, Badan POM memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, kelembagaan, kapasitas maupun kewenangan. Cakupan wilayah Indonesia begitu luas terbentang dari Merauke di timur hingga Sabang di ujung barat dan dari Miangas di sisi utara hingga Rote di ujung selatan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM bergotong royong dan menjalin kemitraan untuk bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan segenap komponen masyarakat.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia		Pada akhirnya, fungsi pengawasan dan pelayanan yang dilakukan seluruh jajaran Badan POM di pusat dan daerah ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan POM tidak hanya melayani kepentingan pengusaha dan industri obat dan makanan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan warga masyarakat sebagai konsumen.

Badan POM melayani masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Sehingga diperlukan kesadaran dan pemahaman untuk saling menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan hanya dapat dirajut dalam bingkai kebangsaan yang inklusif dalam bingkai Pancasila. Nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong dalam keberagaman menjadi identitas nasional dalam wadah dan slogan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran untuk terus berkomitmen melayani, melindungi, dan mengedukasi masyarakat menuju Indonesia bermartabat tinggi secara nasional dan internasional. Hidup NKRI, NKRI Harga Mati, hidup rakyat Indonesia untuk maju bermartabat ke depan. Kita Indonesia, Kita Pancasila.

■ Faisal Nur Jabbar





Reisa Broto Asmoro

”

Hari ini saya senang sekali dapat berpartisipasi pada acara yang diselenggarakan @bpom_ri dalam rangka memperingati *World Food Safety Day*.

Saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang bersama Ibu Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP selaku Kepala Badan POM RI, lalu ada Mr. Stephen Rudgard selaku *representative* dari WHO dan Prof. Hardinsyah, MS, PhD juga Kemal dalam *talkshow* yang penuh dengan ilmu dan inspiratif.

”

Reisa Broto Asmoro



Keamanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita dan anak-anak tercinta. Setiap kali kita membeli bahan pangan, mengolahnya atau bahkan membelinya, pastikan semuanya memenuhi standard keamanan pangan. Karena dengan memastikan keamanan makanan dan minuman yang sehari-hari kita konsumsi tentunya akan sangat menentukan kualitas kesehatan dan kualitas generasi penerus bangsa ke depannya.

Jadi selalu pastikan bahwa semua yang kita konsumsi bebas dari bahan-bahan berbahaya, bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit dan memiliki nilai gizi yg baik. Yakni gizi seimbang. Serta jangan lupa Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli pangan yang aman.

Tentunya apabila kita semua dapat berpartisipasi dalam kesadaran kualitas dan kewanaman pangan yang baik maka diharapkan kita bisa mewujudkan masyarakat bangsa Indonesia menjadi negara yang maju dan terdepan.



@klubpompi



**KLUB
POMPI**

INGAT INGAT **5 KUNCI KEAMANAN PANGAN** **UNTUK MEMILIH PANGAN**

1

Kenali Pangan Aman

2

Beli Pangan yang Aman

3

Baca Label dengan Saksama

4

Jaga Kebersihan

5

Catat/Laporkan Apa yang Ditemui



 Kunci 1

**AKU AMAN UNTUK
DIKONSUMSI, GUYS!**

- aman dari bahaya biologis
- aman dari bahaya kimia
- aman dari bahaya fisik





@klubpompi



**KLUB
POMPI**

Kunci 2

BELI PANGAN YANG AMAN GINI LOH GUYS!

Beli dari
penjual yang
sehat dan bersih

Beli pangan
ditempat yang
bersih

Beli pangan
yang dipajang
dan disimpan di
tempat tertutup





@klubpompi

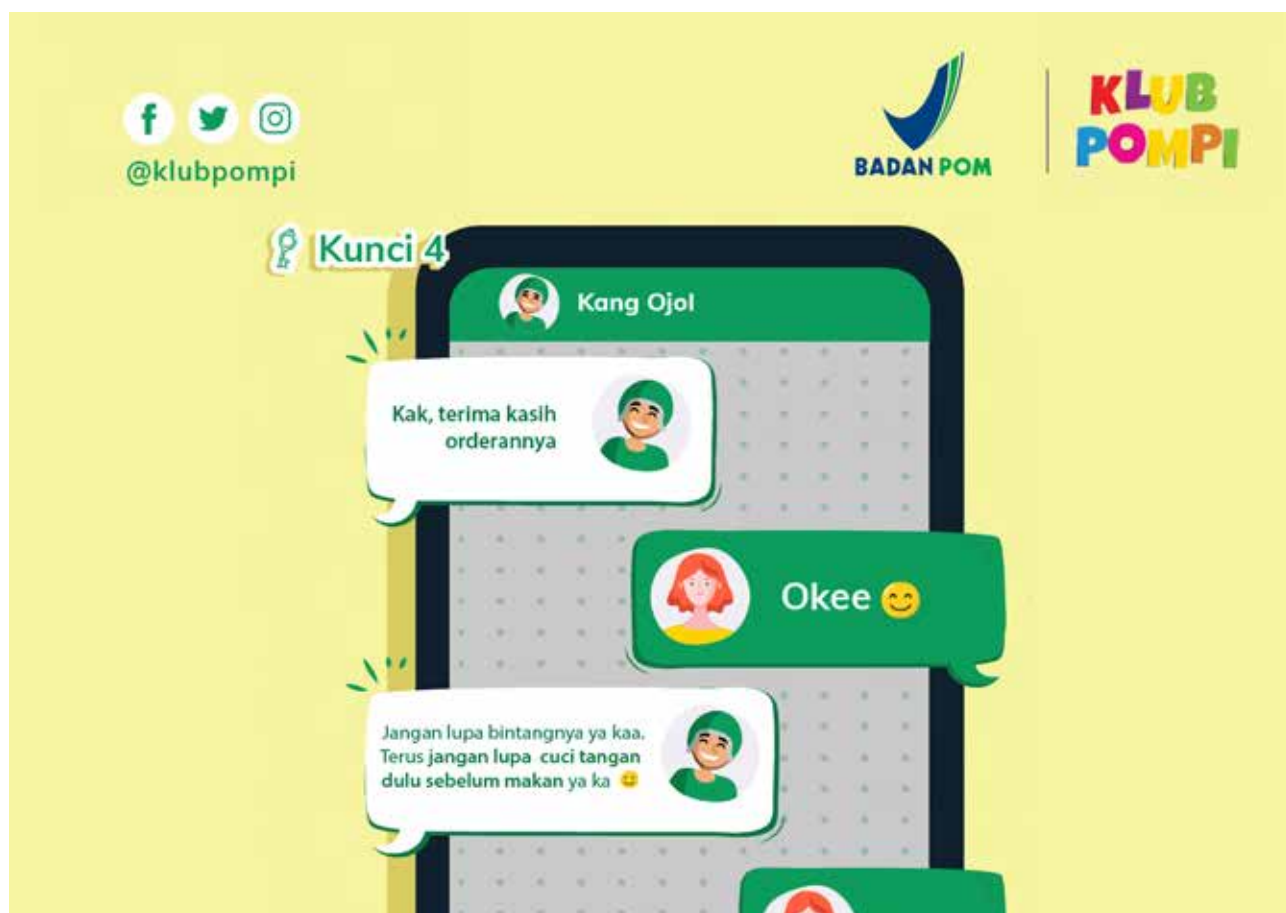


**KLUB
POMPI**



**LIBURAN KE YOGYAKARTA
TIDAK LUPA BELI BAKPIA
SUPAYA AMAN SEKELUARGA
JANGAN LUPA CEK KLIK YA!**





POMPI

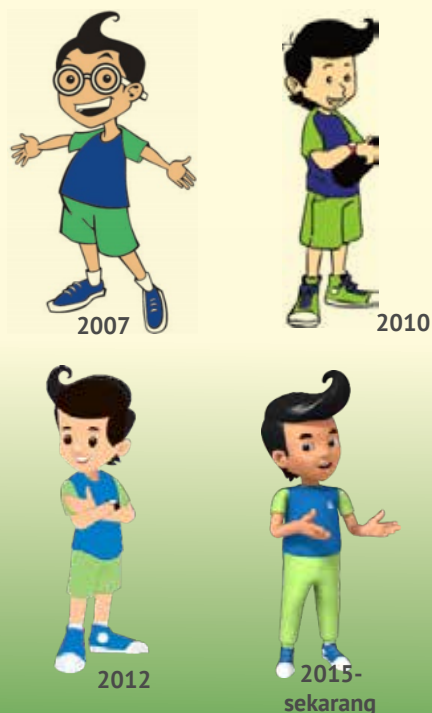
POM PEMBERI INFORMASI

Dalam rangka melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman serta meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memilih pangan yang aman maka perlu dilakukan sosialisasi pesan-pesan keamanan pangan kepada masyarakat. Agar pesan-pesan yang disosialisasikan mudah diingat dan melekat kuat di benak semua orang, maka diperlukan maskot yang dapat membantu dalam memvisualisasikan pesan-pesan tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Deputy Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM yang sekarang berganti nama menjadi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM mengembangkan maskot keamanan pangan bernama POMPI.

Perjalanan POMPI sudah dimulai sejak tahun 2007 tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2007, POMPI diresmikan sebagai maskot keamanan pangan. Visual karakter POMPI yang dikembangkan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari POMPI mengenakan kaca mata dengan visual 2D hingga POMPI tidak mengenakan kacamata dengan visual 3D. Adapun kepanjangan dari POMPI itu sendiri, yaitu POM Pemberi Informasi yang digambarkan dengan karakter seorang anak berperawakan sedang, berumur kira-kira 10 tahun, dengan rambut jambul yang rapi, memiliki watak yang kritis, cerdas, bijaksana, dan rajin belajar sehingga mampu menginformasikan segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan keamanan pangan. POMPI juga berperan sebagai agen perubahan untuk teman-temannya. Adapun Hak Cipta karakter POMPI telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 November 2014 dengan nomor Hak Cipta C00201404455.



POMPI dari tahun ke tahun





POMPI mempunyai orang tua yang sangat penyayang. Ibu POMPI adalah seorang ibu rumah tangga yang cerdas, sangat memperhatikan keluarga, selalu menyediakan dan membuat bekal pangan yang aman, bermutu, dan bergizi. Dan Ayah POMPI adalah seorang ayah yang bijaksana dan selalu memberi dukungan terhadap kegiatan anaknya yang positif. Selain itu, POMPI memiliki teman-teman dan tetangga yang beragam karakternya. Ada Vita, Omi, Ucup, Ito, orangtuanya Ucup, orangtuanya Ito, Pak Helti (Guru Olahraga), dan Ibu Tuti (Guru UKS). Semua karakter tersebut bergabung ke dalam sebuah komunitas yang bernama KLUB POMPI.



AYAH ITO



IBU ITO



AYAH UCUP



IBU UCUP



PAK HELTI
(GURU OLARAGA)



BU TUTI
(GURU UKS)



KLUB POMPI mempunyai *subsite* yang merupakan media informasi keamanan pangan yang dikembangkan oleh Badan POM dimana POMPI dan karakter lainnya berperan sebagai karakter dalam berbagi informasi keamanan pangan kepada masyarakat. *Subsite* tersebut dapat diakses di <http://klubpompi.pom.go.id>. Untuk mendukung kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh KLUB POMPI kepada masyarakat, maka telah dibuat berbagai Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP) berupa *leaflet*, buku, komik, poster, modul, majalah, permainan edukasi keamanan pangan, ular tangga keamanan pangan, lagu, dan video yang dapat diakses di *subsite* tersebut. Selain materi terkait keamanan pangan, pengunjung juga dapat memperoleh informasi lainnya seperti berita, artikel keamanan pangan, dan juga info lomba-lomba.



ITO

Seorang anak berperawakan gemuk, suka makan dan suka jajan, mudah tergoda dengan ajakan teman.



OMI

Seorang anak perempuan suka minata rambut dengan kepang dua, lincah dan riang. Omi mempunyai sifat kritis, tegas, dan selalu ingin tahu.



UCUP

Seorang anak berperawakan kurus. Berkulit lebih gelap dan terkesan dokil, kumel dan tidak sehat. Cenderung agak bandel, berperilaku ceroboh, kurang hati-hati.



VITA

Seorang anak perempuan suka minata rambut kuncir satu, lincah dan riang. VITA adalah teman Pompi yang ramah, punya inisiatif dan solidaritas tinggi.



Dari tahun ke tahun, berbagai macam aktivitas terkait kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keamanan pangan, terutama keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) telah dilakukan oleh KLUB POMPI. Mulai dari *Road show* keamanan pangan ke Sekolah Dasar (SD) dalam bentuk panggung boneka POMPI, koki cilik, permainan cuci tangan, dan pameran keamanan pangan; Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS); Pelatihan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKP-KS); serta berbagai perlombaan pun pernah dilakukan, seperti lomba mewarnai POMPI, lomba menyanyi *jingle* POMPI, dan lomba *story telling* keamanan pangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka pada tahun 2015 untuk memperluas area penyebaran informasi keamanan pangan, KLUB POMPI mulai aktif di berbagai akun media sosial. Akun media sosial pertama yang dibuat, yaitu *Twitter* (@klubpompi). Lalu pada tahun selanjutnya, dibuat akun media sosial KLUB POMPI di *facebook* dan *instagram* (@klubpompi) serta akun *You Tube* (Klub POMPI) di tahun 2017.

Kegiatan-kegiatan KIE Keamanan Pangan yang telah dilakukan di media sosial, yaitu berupa *posting* konten terkait pesan-pesan keamanan pangan, lomba pembuatan video *jingle* keamanan pangan, *Giveaway Time* (*Mini quiz* yang disertai dengan pemberian hadiah bagi yang menjawab dengan cepat dan benar), kerja sama dengan komunitas ibu-ibu (Ibupedia), penayangan iklan yang berisi pesan-pesan keamanan pangan, Tanya POMPI, dan penggunaan berbagai macam *tagline* (#foodsafety, #keamananpangan, #panganaman, #ayosapa, #germassapa).

Sebagai salah satu media informasi keamanan pangan yang terpercaya, KLUB POMPI akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pesan-pesan keamanan pangan dapat terus menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi para pembaca yang tertarik mengikuti info-info terbaru dan tips seputar keamanan pangan dapat langsung mengikuti akun media sosial KLUB POMPI di @klubpompi. (-DNS)

■ Chyntia Dewi Nurhayati Suharma



Aplikasi BPOM *Mobile*



SCAN TO
DOWNLOAD

BPOM *Mobile* adalah aplikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru dari BPOM, mengecek suatu produk dengan memindai kode QR atau kode batang, serta mengirimkan pengaduan terhadap suatu produk.



Jika **Sahabat BPOM** ingin menyampaikan informasi dan permasalahan terkait **Obat dan Makanan** silahkan hubungi kami



081.191.81.533



081.21.9999.533



halobpom@pom.go.id



@halobpom1500533



halobpom1500533_

